

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Daftar riwayat hidup, rekam medis, nomor rekening pegawai	□ UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h □ UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Selama pegawai tidak memberikan persetujuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai
2.		Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
3.		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas	Tidak Terbatas	• Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature	Menimbulkan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/jasa

			a Pemerintah Pasal 6 Huruf b			
--	--	--	---	--	--	--

					Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa	
4.		Dokumen Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j - UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Tidak Terbatas	Muncul persaingan yang tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat

5.		Dokumen penawaran penyedia barang/jasa	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidaksehat	Muncul persaingan yang sehat
----	--	--	--	------------------------------	---	------------------------------

			Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b			
6.		Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), evaluasi penawaran/ kualifikasi/ hasil lelang	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat
7.		Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/ sanggah banding	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat

8.		Data pendukung hasil pemeriksaan ata s pengelolaan dan tanggung jawab	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan daripihak yang tidak bertanggung jawab
----	--	---	--	----------	---	---

		keuangan (kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D	Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28, Pasal 40.			
9.		Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Dapat mengandung informasi rahasia a institusi / merugikan institusi
10.		Laporan Harta Kekayaan Pejabat	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h • Keputusan KPK Nomor Kep.07/KPK /02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5	Selama pejabat memberikan persetujuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan untuk menghindari kejahatan	• Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab • Mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang

			Ayat (7)			
11.		Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihaklain dapat memberikan	Mencegah citra yangnegatif terhada p institusi

			Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas		citra yang negatif terhadap institusi	
12.		Akses Ruang Server	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga/melindungi hak akses
13.		Internet Protocol (IP) Address	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Keamanan Sistem/ Jaringan

14.		Kode Akses Elektronik	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Keamanan Sistem
-----	--	-----------------------	---	----------------	--------------------------------	-----------------

			dan Transaks iElektronik Pasal 1 Angka 16			
15.		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural dan notulensi hasil rapat Baperjakat	• Pasal 17 huruf i Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik • Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaia n	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja
16.		Rekam Medik/hasil chek up perorangan PNS/Pejabat	- Pasal 17 huruf i Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik - Undang-	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

			Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
17.		Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	- Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
18.		Data rencana penempatan CPNS/PNS	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah Kolusi
19.		Data pribadi klien bantuan hukum	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Tidak Terbatas	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (terkait dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi

20.		Soal Tes CPNS	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Sampai dengan pengumuman hasil tes	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
-----	--	---------------	---	------------------------------------	---	--------------

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



Dr. Nana Supiana
Pembina Utama Muda
NIP. 197112132000121002